

Prosiding Seminar Nasional

Bangkitkan Pendidikan, Teknologi, dan Kesehatan Lebih Cepat,
untuk Indonesia Lebih Kuat

Banda Aceh, 19-20 Oktober 2022
Universitas Bina Bangsa Getsempena



UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH: PERAN PRINSIP ADMINISTRASI, PROFESIONALISME GURU DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN MUTU SEKOLAH

Nazariana*¹ dan Mulia Putra²

¹ SMP Negeri 1 Montasik

² Universitas Bina Bangsa Getsempena

Abstrak

Mutu Pendidikan berperan penting dalam evolusi ekonomi dan pengembangan sosial di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengali langkah peningkatan mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Montasik. Sekolah dalam hal ini merupakan suatu organisasi publik yang memberikan jasa layanan pendidikan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas individu masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, menjadi suatu hal yang wajar apabila masyarakat menuntut tersedianya "sekolah yang baik" yang tercermin dari efektifitas kinerja sekolah yang bersangkutan. Di sinilah manajemen mutu pendidikan di sekolah menuntut peran kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, serta partisipasi masyarakat secara optimal. Mutu atau lebih sering disebut dengan istilah kualitas merupakan gambaran karakteristik menyeluruh dari barangatau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan pihak pengguna. Berkaitan dengan pendidikan di sekolah, mutu pendidikan senantiasa merujuk pada spesifikasi pelayanan pendidikan yang sesuai dengan tujuan atau manfaat dari pendidikan itu sendiri. Itulah sebabnya, dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu program pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi sekolah akan sangat sulit dicapai tanpa adanya keselarasan pandangan antara kepala sekolah, guru dan masyarakat tentang makna pendidikan yang sebenarnya, serta bagaimana seharusnya proses pendidikan di sekolah itu dilaksanakan. Oleh karenanya, sudah seharusnya lah pimpinan sekolah yang dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru dan masyarakat bekerjasama secara terpadu dalam mewujudkan setiap cita-cita pendidikan untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan moralnya.

Kata Kunci: mutu pendidikan, kepala sekolah, partisipasi masyarakat

Abstract

Education quality plays an important role in the economic evolution and social development of a country. This study aims to multiply the steps to improve the quality of education in SMP Negeri 1 Montasik. The school in this case is a public organization that provides educational services for the community in order to improve the quality of the individual community itself. Therefore, it becomes a natural thing if the community demands the availability of "good schools" which is reflected in the effectiveness of the school's performance in question. This is where the quality management of education in schools demands the role of principal leadership, teacher professionalism, and optimal community participation. Quality or more often referred to as quality is a description of the overall characteristics of goods or services that show their ability to satisfy the needs of the user. In relation to education in schools, the quality of education always refers to the specifications of educational services

*correspondence Address

E-mail: nazarianalampasehlhok@gmail.com

that are in accordance with the goals or benefits of education itself. That is why, it can be said that the success of an educational program organized by a school organization will be very difficult to achieve without a harmony of views between school principals, teachers and the community about the true meaning of education, and how the education process in schools should be implemented. Therefore, school leaders should, in this case, principals, teachers and the community work together in an integrated manner in realizing every educational goal to form a quality future generation both in terms of knowledge, skills, as well as attitudes and morals.

Keywords: *quality of education, principals, community participation*

PENDAHULUAN

Ketika kita berbicara tentang pendidikan, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah "sekolah". Sekolah dalam hal ini adalah organisasi publik yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu masyarakat. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat menuntut adanya "sekolah yang baik", yang tercermin dari kinerja sekolah tersebut. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah harus mengutamakan hakikat pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan, dimana pendidikan dimaknai sebagai usaha seseorang untuk mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai perkembangan jasmani, mental dan spiritual. dalam masyarakat dan budaya secara lestari, sehingga berkembang kedewasaan dan kemandirian dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Artinya pendidikan adalah proses mengembangkan dan membentuk watak serta kepribadian peserta didik.

Di lingkungan sekolah, fungsi pendidikan yang ideal tidak akan pernah berkembang, jika makna dan pentingnya proses pendidikan itu sendiri tidak sesuai dengan pendapat dan pemahaman berbagai pihak yang berasal dari pengurus, pimpinan sekolah (terutama kepala sekolah dan guru), dan masyarakat, khususnya wali siswa. Pernyataan bahwa tujuan proses pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah adalah pengembangan keterampilan dan kemampuan intelektual serta pemajuan sikap mental, sosial, dan moral siswa harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Inilah sesungguhnya tujuan dari proses pendidikan sekolah, yang dituju dan dicapai, dan keberhasilannya ditunjukkan dengan kemampuan lulusan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan sekolah. nilai dan norma yang dianut.

Bahkan, sampai saat ini masih sedikit yang beranggapan bahwa keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari tingginya nilai (angka) yang dicapai siswa. Nilai ini seolah-olah menjadi indikator berhasil tidaknya pembelajaran yang diikuti oleh siswa di sekolah tersebut. Kesamaan tersebut kemudian menjadi syarat bagi penyelenggara pendidikan

sekolah untuk dapat memberikan nilai kepada peserta didik sebagai hasil belajar sesuai dengan tuntutan masyarakat, khususnya orang tua peserta didik. Sekarang pertanyaannya, haruskah penyelenggara pendidikan sekolah memberikan nilai hasil belajar kepada siswa dengan mempertimbangkan hanya satu aspek/kompetensi yang membedakannya? Di sini, pengelolaan mutu pendidikan di sekolah memerlukan peran kunci, profesionalisme guru dan komitmen optimal masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari individu dan kelompok yang diteliti (Creswell, 2014:15). Penelitian ini menerapkan studi multi kasus karena kasusnya lebih dari satu dan bervariasi. Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah “Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah: Peran Prinsip Administrasi, Profesionalisme, Guru dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Mutu Sekolah”. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Prov. Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arah mutu pendidikan yang dicapai sekolah dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya sekolah untuk mencapainya. Guru dipilih karena merupakan aktor yang berusaha meningkatkan kualitas pengajaran melalui proses pembelajaran. Wawancara mendalam semi-terstruktur dengan kepala sekolah dan guru masing-masing sekolah digunakan untuk mengumpulkan data. Studi dokumenter juga dilakukan untuk mendukung materi wawancara. Privasi dan kerahasiaan kepala sekolah dan guru dijaga agar mereka merasa nyaman mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Teknik triangulasi validitas data dilakukan melalui observasi tidak terstruktur. Obyek observasi adalah kondisi sekolah dan kegiatan yang dapat membantu untuk memahami topik penelitian yang diperoleh dari bahan wawancara. Member check dilakukan untuk mengkonfirmasi informasi yang diterima. Review anggota dilakukan sebagai diskusi dengan para ahli dan rekan-rekan yang memahami subjek penelitian ini.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Proses analisis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014:26), yang terdiri dari tiga alur aktivitas, yaitu penjumlahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/konfirmasi. Kegiatan tersebut berlangsung secara simultan dan berkesinambungan. Proses analisis data dilakukan secara rutin dan berkesinambungan hingga data jenuh. Informasi diringkas dengan menyortir informasi dan mengelompokkannya ke dalam kategori tematik. Tampilan data yang diterapkan menggabungkan data yang dikumpulkan dan kemudian menyajikannya sebagai teks naratif. Dengan langkah ini lebih mudah untuk melihat

masalah yang terjadi dan memikirkan apakah kesimpulannya benar atau tidak, sehingga perlu dilakukan analisis data kembali. Kesimpulan dibuat dengan membandingkan hasil asumsi awal dari awal penelitian sampai akhir penelitian, yang akhirnya mengarah pada kesimpulan rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mutu, atau lebih umum lagi, kualitas, adalah deskripsi karakteristik umum barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pengguna. Dari segi pengajaran, mutu pendidikan selalu berkaitan dengan spesifikasi layanan pendidikan yang selaras dengan tujuan atau manfaat pendidikan itu sendiri. Mutu pendidikan berkaitan dengan pengguna jasa pendidikan, namun bukan berarti mutu pendidikan ini tidak memiliki standar. Pengertian pelayanan pendidikan di sekolah selalu berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada ayat 1 Pasal 1, PP no. 32 Tahun 2013 menegaskan bahwa “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ruang lingkup standar pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut meliputi delapan standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kualifikasi kelulusan, standar guru dan pendidik, standar sarana dan prasarana, standar administrasi, standar keuangan, dan standar evaluasi pendidikan (Pasal 2). paragraf 2). 1) (Republik Indonesia, 2013).

Dalam pelaksanaannya mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan dasar di Indonesia yang menganut sistem pendidikan desentralisasi, dimana kewajiban dan kewenangan menyelenggarakan pelayanan pendidikan ada pada pemerintah kabupaten/kota, Permendiknas No. 15/2010 dengan perubahan Permendikbud no. 23 sejak tahun 2013 sebagai tolak ukur penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota (Kemendiknas, 2010). Perintah ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang sesedikit mungkin kepada masyarakat, yang tentunya harus dikelola sebaik mungkin setiap kabupaten/kota, termasuk setiap satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MT) itu sendiri, agar pelayanan pendidikan tersebut memberikan pelayanan yang berkualitas kepada daerahnya bahkan dalam kondisi yang paling minim sekalipun.

Manajemen sekolah otonom, Fullan dan Watson (2000:11) menyatakan: MBS adalah pengembangan kapasitas lokal yang beroperasi dalam kerangka eksternal. Meskipun ada elemen struktural untuk MBS, budaya adalah pendorong utama perubahan, yaitu. budaya

yang berfokus pada perbaikan terus-menerus. Ketika MBS berpartisipasi dalam pemecahan masalah lokal dan memobilisasi upaya semua pemangku kepentingan, kesuksesan tercapai. (MBS adalah pengembangan kapasitas lokal dengan kerangka eksternal. Jika MBS memiliki elemen struktural, budaya adalah agen perubahan utama, seperti halnya budaya yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan. Di sini peran MBS adalah untuk mempromosikan masalah lokal dan memobilisasi semua kekuatan yang melibatkan pemangku kepentingan untuk sukses)

Jelas dari pernyataan ini bahwa manajemen sekolah (MBS) mempromosikan pemecahan masalah dengan memobilisasi semua pemangku kepentingan sekolah. Artinya MBS merupakan mekanisme desentralisasi sistemik yang berlaku pada setiap sekolah yang mengemban amanat manajemen pendidikan untuk meningkatkan kualitas lulusan.

Caldwell dan De Corte (2005:1) melihat manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai paradigma strategis sebagai desentralisasi sistematis kekuasaan dan tanggung jawab kepada sekolah sehingga mereka dapat membuat keputusan penting terkait dengan implementasi kerangka, kebijakan pencapaian . . . sasaran , kurikulum, standar dan tanggung jawab pendidikan di sekolah ini. Oleh karena itu, pengelolaan ini memerlukan perangkat organisasi yang tepat, antara lain perluasan mitra sekolah dengan sektor lain (tokoh masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang seharusnya mendukung program sekolah), redefinisi hubungan antar mitra, penguatan jaringan antar sistem dan antar sekolah. , memperjelas tugas dan tugas masing-masing fungsi dan peserta dalam sistem, menetapkan batasan tanggung jawab masing-masing aktor, menciptakan alat praktis, memenuhi kebutuhan informasi sekolah dan mendistribusikan kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya kepada bawahan.

Model MBS diterapkan di berbagai lembaga pendidikan, termasuk sekolah dasar dan menengah, dengan tujuan menerapkan praktik kerja yang lebih baik untuk meningkatkan penggunaan sumber daya dan penargetan personel; meningkatkan keterampilan profesional guru dan dosen sekolah; menghasilkan ide-ide baru untuk implementasi kurikulum, penggunaan teknologi pembelajaran dan penggunaan perangkat pembelajaran; meningkatkan otonomi sekolah yang ditandai dengan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkualitas tinggi; sehingga setiap elemen dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu sekolah. Yang paling penting dari model kepemimpinan ini adalah seperti disampaikan oleh Sagala (2009:87) “kembali ke pendidikan dasar”, dimana pendidikan adalah pengenalan nilai-nilai kemanusiaan yang positif sehingga pendidikan dapat menciptakan hubungan yang koheren antara keluarga, sekolah dan masyarakat. dan

masyarakat. Partisipasi ketiga komponen tersebut tidak ada artinya jika keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah tidak meningkatkan dan kualitas suasana belajar. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diterapkan harus mampu menghasilkan berbagai perubahan yang dapat meningkatkan kepuasan kerja guru, apalagi jika guru memiliki peran yang lebih menentukan dari sekedar konseling, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kualitas lulusan.

Konsep MBS secara praktis menggambarkan karakteristik otonomi dan kemandirian manajemen sekolah, yang menunjukkan perlunya memperhatikan keadaan dan potensi sekolah. Dalam hal ini, otonomi sekolah berarti komitmen yang kuat terhadap pengambilan keputusan pendidikan di sekolah oleh semua elemen yang terkait dengan sekolah itu, yaitu staf sekolah, entitas terkait sekolah, siswa, orang tua dan masyarakat luas. Otonomi di sini menunjukkan peran komplementer profesional, orang tua dan masyarakat dalam memenuhi tuntutan kualitas pendidikan dalam persaingan global. Konsep MBS tidak menjadikan sekolah “egois”, justru menjadikan sekolah lebih mandiri, inovatif dan kreatif.

Berdasarkan harapan akan perubahan, dipandang perlu untuk membangun sistem manajemen sekolah yang dapat menanamkan keterampilan dasar pada siswa melalui konsep kemandirian, otonomi dan pengaruh sekolah sebagai reformasi pendidikan yang merencanakan dan mengubah struktur untuk memberikan kesempatan kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, manajemen sekolah (MBS) merupakan salah satu program manajemen sekolah yang harus meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Berdasarkan kebijakan Pasal 51 Undang-Undang Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan: “Pengelolaan satuan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah harus dilaksanakan menurut standar pelayanan minimal dan prinsip pengelolaan berbasis sekolah. Di Indonesia, MBS diprioritaskan dengan tiga pilar yaitu kepemimpinan, PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan menyenangkan) dan keterlibatan masyarakat (Republik Indonesia, 2003).

Implementasi MBS ini mencakup paling tidak tujuh bidang manajemen, yaitu:

- (1) manajemen kurikulum dan pembelajaran,
- (2) manajemen peserta didik,
- (3) manajemen pendidik dan tenaga kependidikan,
- (4) manajemen pembiayaan,
- (5) manajemen sarana dan prasarana,
- (6) manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat, dan
- (7) manajemen budaya dan lingkungan sekolah.

Ketujuh bidang tersebut dikelola secara profesional melalui empat proses manajemen sekolah untuk mewujudkan unit manajemen sekolah yang berkualitas. Proses yang relevan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Melalui proses ini, efektivitas kepemimpinan sebuah sekolah dapat meningkatkan kualitas sekolah tersebut.

Administrasi kepala sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas administrasi sekolah adalah wajib. Efektivitas pengelolaan sekolah harus terus ditingkatkan untuk memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat serta tuntutan kehidupan sosial masyarakat yang selalu berubah. Pemerintah, organisasi guru, kepala sekolah dan terutama guru sendiri bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman ini.

Tugas kepala sekolah adalah mengatur pelaksanaan pengajaran di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai segalanya, kepala sekolah oleh karena itu harus dapat meneliti dan menggunakan semua sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. Tugas utama direktur dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya sekolah, khususnya guru sebagai tulang punggung belajar siswa, pengelolaan sumber daya tersebut secara langsung mempengaruhi pencapaian tujuan sekolah itu sendiri.

Di sini kepala sekolah dipandang sebagai seorang pemimpin, sebagai orang yang di atas segalanya memiliki keterampilan dan minat di bidang pendidikan sedemikian rupa sehingga ia dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan tertentu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. dia memimpin Mengingat kepala sekolah merupakan salah satu sumbangsih sekolah yang tanggung jawab dan tugasnya sangat mempengaruhi berlangsungnya pengajaran, maka diperlukan kepala sekolah yang tangguh, yaitu kepala sekolah dengan kualitas/keterampilan yang mendukung tanggung jawab dan tugasnya dalam kepemimpinan. sekolah organisasi sekolah Oleh karena itu, pemerintah dalam Permendikna no. 13 menetapkan seperangkat kualifikasi sejak tahun 2007 yang akan menjadi standar bagi kepala sekolah (Depdiknas, 2007). Kelayakan biasanya mencakup:

1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
2. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal

(TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan

4. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatanyang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kriteria sekolah efektif memiliki karakteristik yang berkorelasi dengan prestasi belajar siswa, sebagaimana dikemukakan oleh Kirk dan Jones (2004:2), kriteria sekolah efektif memiliki tujuh karakteristik yang berbeda, yaitu kejelasan belajar, misi sekolah, harapan yang tinggi untuk prestasi yang tinggi, manajemen pembelajaran, kesempatan siswa untuk belajar dan menyelesaikan tugas, lingkungan yang aman, hubungan yang positif antara sekolah dan keluarga siswa, dan frekuensi pemantauan kemajuan siswa. Kepemimpinan pembelajaran sebagai salah satu dari tujuh kriteria kinerja sekolah tidak lepas dari peran dan tugas guru sebagai bagian dari pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa. khususnya pada jenjang pendidikan, pendidikan dasar dan menengah. Di sini, guru adalah karakter yang paling banyak berinteraksi dengan bagian lain dari lingkungan sekolah, terutama dengan siswa. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan evaluasi, serta membuka komunikasi dengan masyarakat (Sagala, 2009:6).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut peran, tugas dan tanggung jawabnya, kedudukan seorang guru dapat digolongkan sebagai tugas profesional, yang dalam hal ini Omstein et al. Sagalassa (2009:7) menjelaskan pengertian profesi sebagai berikut:

1. Tugas yang dilakukan sebagai karir yang akan dilakukan sepanjang hayat.
2. Sebelum melakukan pekerjaan diperlukan ilmu dan keterampilan tertentu, memerlukan pelatihan khusus dalam jangka waktu tertentu, dan tidak setiap orang dengan leluasa dapat melakukannya tanpa mengikuti persiapan yang memadai.
3. Memiliki otonomi dalam mengambil keputusan terkait dengan tugasnya, tidak diatur oleh pihak lain walaupun dari atasannya.
4. Mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang diakibatkan oleh keputusan profesional yang diambilnya.
5. Memiliki komitmen terhadap jabatan dan klien, dan dilakukan dengan menggunakan administrasi yang jelas dan mudah.

6. Memiliki organisasi profesi dan asosiasi yang sepenuhnya diatur sendiri oleh anggotanya.
7. Memiliki kode etik tersendiri untuk membantu memberikan penjelasan riil yang meyakinkan kepada klien atau khalayak ramai; dan
8. Mempunyai status sosial dan gaji yang tinggi bila dibandingkan dengan jabatan lainnya.

Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan Indonesia, pemerintah mewajibkan “guru harus memiliki kualifikasi akademik, kualifikasi, sertifikat pelatihan, sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan tujuan pendidikan nasional”. (UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 8), jika “kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi pada program sarjana atau pascasarjana” (UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 9) (Republik Indonesia, 2005).

Dengan ditetapkannya standar kualifikasi guru tersebut, diharapkan guru menjadi sosok profesional yang komprehensif pada jenjang tertinggi sistem pendidikan nasional. Bahwa guru, selain mengajar dan mengawasi guru, mengevaluasi hasil belajar siswa, mempersiapkan manajemen pembelajaran yang diperlukan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembelajaran, terus berupaya untuk melengkapi dan mengembangkan otoritas visi ilmiahnya.

Peran Partisipasi Masyarakat. Istilah partisipasi berarti partisipasi di mana sekelompok orang mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini, konsep partisipasi mencakup beberapa unsur penting, antara lain: Pertama, partisipasi bukan hanya partisipasi fisik, tetapi juga pikiran dan perasaan (mental dan emosional). Kedua, partisipasi dapat digunakan untuk mendorong orang untuk membawa bakat mereka ke dalam situasi kelompok sehingga keterampilan berpikir dan inisiatif mereka dapat muncul dan diarahkan pada tujuan kelompok. Ketiga, partisipasi melibatkan pemahaman orang untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab atas kegiatan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin seseorang secara psikologis terlibat dalam tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, semakin besar pula tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, termasuk pengembangan sumber daya manusia melalui proses pendidikan di sekolah, memiliki tema sebagai berikut: Partisipasi masyarakat dalam program bervariasi sesuai dengan jenis partisipasinya. dapat dibedakan menjadi lima jenis, yaitu sumbangan gagasan, sumbangan tenaga, sumbangan aset, sumbangan keterampilan atau kemampuan, dan sumbangan partisipasi sosial. Dari berbagai bentuk partisipasi tersebut diharapkan sekolah dapat memberdayakan mereka

seoptimal mungkin, sehingga partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan dapat terwujud. Oleh karena itu, sangat penting bagi sekolah untuk berperan sebagai pemimpin aktif dalam mempromosikan program sekolah melalui keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat.

Dalam hal ini, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mensukseskan program pendidikan sekolah harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Menciptakan komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat.
2. Keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam program sekolah Pepatah "Kamu tidak senang jika kamu tidak tahu" berlaku juga di sini. Oleh karena itu, sekolah harus mempresentasikan program dan kegiatannya kepada masyarakat dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan, seperti melaksanakan program sosial kemasyarakatan, melakukan dialog dalam rangka peningkatan pendidikan masyarakat, dll.
3. Otorisasi dewan sekolah. Keberadaan dewan sekolah merupakan faktor penentu dalam pelaksanaan otonomi belajar di sekolah. Melalui Dinas Pendidikan, orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan sekolah.

Upaya peningkatan kualitas pengajaran di sekolah dapat dioptimalkan dengan mengupayakan peningkatan keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam mendukung program sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan uraian “Upaya peningkatan mutu pembelajaran sekolah: peran prinsip administrasi, profesionalisme, peran guru dan masyarakat dalam perencanaan mutu sekolah”, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah . sangat tinggi. sulit dicapai tanpa menyelaraskan pendapat kepala sekolah, guru, dan masyarakat tentang makna pendidikan yang sebenarnya dan pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Oleh karena itu kepala sekolah, direktur, guru, dan masyarakat harus bekerja sama secara terpadu untuk mewujudkan setiap tujuan pendidikan guna membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Caldwell, B. J., & De Corte, E. (2005). *School-Based Management*. Belgium: The International Academy of Education (IAE). Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001410/141025e.pdf>
- Fullan, M., & Watson, N. (2000). *School-Based Management: Reconceptualizing to Improve Learning Outcomes*. *School Effectiveness and School Improvement*, 11(4), 453–473. <https://doi.org/10.1076/sesi.11.4.453.3561>
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Panduan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta: Dit. Pembinaan SD Ditjen. Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Retrieved from <http://mbscenter.or.id/sources/44Panduan MBS 1 Grand Design Pola Pembinaan MBS di SD.pdf>
- Kementrian Pendidikan Nasional. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah*. Jakarta. Retrieved from http://www.mediapendidikan.info/wp-content/uploads/2014/12/permendiknas_13-Tahun_2007-sks_lamp.pdf
- Kementrian Pendidikan Nasional. (2010). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota*. Jakarta. Retrieved from <http://www.kinerja.or.id/pdf/704f03e9-c651-451b-8c1f-dd16ec40740d.pdf>
- Kirk, D. J., & Jones, T. L. (2004). *Effective Schools*. London: Pearson Education. Retrieved From https://Images.Pearsonassessments.Com/Images/Tmrs/Tmrs_Rg/Effectiveschools.Pdf?WT.Mc_Id=TMRS_Effective_Schools
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta. Retrieved From <https://Kemenag.Go.Id/File/Dokumen/UU2003.Pdf>
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*. Retrieved from <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf>
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Retrieved from http://banpaudpnf.or.id/upload/download-center/PP No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP No.19 Tah_1508753201.pdf
- Sagala, S. (2009). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung : Alfabeta.